



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG**

JALAN RAYA JATILAWANG NO 1 JATILAWANG

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 .	6
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	21
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	40
BAB V Penutup	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Jatilawang	8
Tabel 2.2 Program Program dan Prakiraan Maju Tahun Anggarab 2025	23
Tabel 4.1 Matrik Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2025	41

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya. Semoga dokumen yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jatilawang, 11 Juli 2024

CAMAT JATILAWANG



R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.

Pembina Tingkat I

19691006 19903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dan mewujudkan cita-cita pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2025 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Renja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Renja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya sebagai pedoman Kecamatan Jatilawang dalam implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, analisis kinerja perangkat daerah, isu-isu penting perangkat daerah dan reviu terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan Isu strategis yang didalamnya terdapat tujuan dan sasaran yang ingin di capai perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II Tahun Anggaran 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan

Jatilawang sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis capaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas rekapitulasi evaluasi hasil kerja tahunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kecamatan Jatilawang

OPD : KECAMATAN JATILAWANG

SUB OPD : KECAMATAN JATILAWANG

Tujuan/Sasaran / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2024		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
											1		2									
3	4	4A	5		6		7				8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
									K	Rp												
[1] Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																						

	Persentase capaian kinerja Penyelengga raan Pemerintah Kecamatan	%	100		10 0	100		100		4.5 9		5.7		5.7		5.7		5.7		5.7	
[2] Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintah n kecamatan	Nilai	84. 75		85. 6	84. 55		84. 55		0		0		0		0				0	
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA								2.894.754 .713		2.894.754 .713		250.423. 696		973.282. 944		1.223.706 .640		33. 6			
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100		10 0	100		100		33. 33		44. 46		44. 46		44.4 6		44. 46		44.4 6	

[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49.900.00 0		49.900.00 0		3.452.00 0		9.660.49 0		13.112.49 0		19. 37				
	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	%	100		10 0		100		100		6.8 2		15. 91		15. 91		15.9 1		15. 91		15.9 1	
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								49.900.00 0		49.900.00 0		3.452.00 0		9.660.49 0		13.112.49 0		19. 37				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11		10		11		11		3		7		7		63.6 4		7		63.6 4	

[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah								167.067.284		167.067.284		12.675.650		22.790.274		35.465.924		13.63				
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	100		10		100		100		72.86		95.23		95.23		95.23		95.23		95.23	
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								5.144.500		5.144.500		1.343.000				1.343.000		0				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15				5		5		2		0		2		40		2		13.33	
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								32.075.500		32.075.500		3.719.500				3.719.500		0				

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3				1		1		3		0		3		300		3		100	
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							9.736.884		9.736.884		2.254.000		2.670.000		4.924.000		27.41					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9				3		3		3		2		5		166.67		5		55.56	
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor							78.710.000		78.710.000		4.978.150		13.317.547		18.295.697		16.92					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36				12		12		3		3		6		50		6		16.67	
[5] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							7.665.000		7.665.000		381.000		325.000		706.000		4.24					

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15				5		5		1		2		3		60		3		20	
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							33.735.400		33.735.400				6.477.727		6.477.727		19.2					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36				12		12		3		3		6		50		6		16.67	
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							378.349.591		378.349.591		57.942.292		96.137.991		154.080.283		25.46					
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	100		100		100		100		17.91		34.57		34.57		34.57		34.57		34.57	

[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								45.693.75 1		45.693.75 1		3.955.78 0		6.158.22 3		10.114.00 3		13. 48				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36					12		12		3		3		6		50		6		16.6 7	
[5] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								9.000.000		9.000.000				9.000.00 0		9.000.000		100				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Laporan	81					27		27		1		0		1		3.7		1		1.23	
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								323.655.8 40		323.655.8 40		53.986.5 12		80.979.7 68		134.966.2 80		25. 02				

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36				12		12		3		3		6		50		6		16.6 7	
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.500.000		4.500.000													
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21		4		7		7		3		2		5		71.4 3		5		23.8 1	
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4.500.000		4.500.000													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9		3		3		3		1		1		2		66.6 7		2		22.2 2	

[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.294.937.838		2.294.937.838		176.353.754		844.694.189		1.021.047.943		36.82				
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100		100				100		59.5		63.89		63.89		63.89		63.89		63.89	
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2.280.637.838		2.280.637.838		173.753.754		842.094.189		1.015.847.943		36.91				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18		16		18		18		17		17		17		94.44		17		94.44	
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								14.300.000		14.300.000		2.600.000		2.600.000		5.200.000		18.18				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36				12		12		3		1		4		33.33		4		11.11	
[2] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan																						

	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100		10 0		100		100		9.1 7		11. 39		11. 39		11.3 9		11. 39		11.3 9	
[3] PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM																						
[3] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA																						
[3] PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK																						
[3] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM								39.500.00 0		39.500.00 0		6.500.00 0		12.000.0 00		18.500.00 0		30. 39				

	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100		100			100		100		0		0		0					0	
[4] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								39.500.000		39.500.000		6.500.000		12.000.000		18.500.000		30.39				
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	100				100		100		50		50		50		50		50		50	
[5] Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								39.500.000		39.500.000		6.500.000		12.000.000		18.500.000		30.39				

	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6				2		2		2		0		2		100		2		33.3 3	
[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								10.000.00 0		10.000.00 0		250.000		3.175.00 0		3.425.000			31. 75			
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100		10 0		100		100		12. 5		12. 5		12. 5		12.5		12. 5		12.5	
[4] Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								10.000.00 0		10.000.00 0		250.000		3.175.00 0		3.425.000			31. 75			

	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	100				100		100	12.5		12.5		12.5		12.5		12.5		12.5	
[5] Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							10.000.000		10.000.000		250.000		3.175.000		3.425.000		31.75				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyara katan	4				4		4	1		1		1		25		1		25	

Sumber : E-monev Triwulan II Tahun 2024

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II. Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Jatilawang baik belanja operasional maupun belanja modal sebesar Rp. 2.944.254.713 dimana belanja pegawai sebesar Rp. 2.292.937.838 dan belanja barang dan jasa Rp. 649.316.875 dengan 6 program dan 14 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.288.062.678 dengan belanja pegawai sebesar Rp. dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 356.943.444. Capaian kinerja fisik sebesar 42,24 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 42,24 %.

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan II telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggungjawabnya. Gambaran keberhasilan capaian, tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Capaian indikator utama dari program dan kegiatan di Kecamatan Jatilawang sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan, masih ada yang dibawah target dan ada yang melampaui target.

Faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kekosongan Pejabat yaitu Kasi Pemerintahan Desa dan Kasi Trantib yang membuat kegiatan tertunda;
2. Tidak terdapat anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan;
3. Jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III atau IV;
4. Kesalahan persepsi capaian;
5. Perubahan dan pergeseran anggaran.

Kebijakan atau tindakan yang diambil dalam mengatasi penyebab tidak tercapainya kegiatan yaitu :

1. Mengajukan pengusulan pengisian jabatan yang kosong kepada BKPSDM ;
2. Menghitung ulang seua kebutuhan dan melakukan perubahan anggaran;
3. Jadwal kegiatan yang dapat dimajukan untuk dilaksanakan terlebih dahulu;
4. Retargeting pada sub kegiatan;

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 menjadi acuan dalam rancangan awal RKPD Kecamatan Jatilawang Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Berikut Rencana Program dan perkiraan maju Tahun anggaran 2025.

Tabel 2.2
Rencana Program dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			TARGET 2024	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
KECAMATAN JATILAWANG				2,924,814,000		3,063,572,000			
7	UNSUR KEWILAYAHAN			62,550,000		68,600,000			
7.01	KECAMATAN			62,550,000		68,600,000	KECAMATAN JATILAWANG		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.5 Indeks	9,200,000	86.5 Indeks	9,200,000	KECAMATAN JATILAWANG		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1,000,000	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1,000,000		1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
				Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	4 Laporan		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	1,000,000	100%	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG		

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,000,000	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	7,000,000	100%	7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			7,000,000		7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit		1 Unit		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	200,000	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	100,000	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	100,000	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	15,000,000	100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100%	15,000,000	100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11 Laporan	5,000,000	11 Laporan	5,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	200,000	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	200,000	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			100,000		100,000	KECAMATAN JATILAWANG
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	100,000	2 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	11,150,000	100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	11,150,000	100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	7,500,000	37 Orang	7,500,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	37 Orang	3,650,000	37 Orang	3,650,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	27,000,000	100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	27,000,000	100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	6,000,000	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	6,000,000	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	KECAMATAN JATILAWANG
X	NON URUSAN			2,862,264,000		2,862,264,000	
X.XX	NON URUSAN			2,862,264,000		2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2,862,264,000	100%	2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	4,661,000	7 Dokumen	4,661,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,368,000	3 Dokumen	2,368,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2,293,000	4 Laporan	2,293,000	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	2,106,605,665	100%	2,106,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2,076,605,665	18 Orang/Bulan	2,076,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	165,414,584	100%	165,414,584	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6,255,884	5 Paket	6,255,884	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,686,000	1 Paket	31,686,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10,416,500	3 Paket	10,416,500	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15,000,000	12 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	5 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85,856,200	12 Laporan	85,856,200	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1,200,000	2 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	50,000,000	100%	50,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	418,393,751	100%	418,393,751	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50,693,751	12 Laporan	50,693,751	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Laporan	7,700,000	27 Laporan	7,700,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	360,000,000	12 Laporan	360,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	117,189,000	100%	117,189,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77,840,000	11 Unit	77,840,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15,000,000	20 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	19,350,000	3 Unit	19,350,000	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit	4,999,000	1 Unit	4,999,000	KECAMATAN JATILAWANG
-----------------	--	--	--------	-----------	--------	-----------	----------------------

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintahan. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif dan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam realitanya, masalah pelayanan publik masih menjadi pusat perhatian dan masih banyak yang menganggap kurang optimal. Atau dengan kata lain masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan yang ada saat ini. Beberapa masalah yang masih timbul yaitu masih kurang efisien, lamban, dan waktu penyelesaian. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik adalah faktor SDM, tata, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi, teknologi informasi dan aturan yang diberlakukan.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dibenahi pemerintah. Khususnya kecamatan yang terlibat langsung dalam pelayanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, kecamatan perlu memperbaiki pelayanan yang telah ada menjadi pelayanan yang lebih berkualitas.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Kecamatan Jatilawang mempunyai tugas peran strategis di bidang Pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Tujuan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM
4. Memperkuat Ketahanan Pangan

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

3.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat Daerah yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Jatilawang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treatment*). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturraden Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. *Strenght* (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pelayanan kecamatan;
2. SDM Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 32 orang;
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018.

B. *Weakness* (Kelemahan)

Kecamatan Jatilawang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Masalah teknis terkait operasional;
2. Terdapat pegawai yang kurang menguasai IT;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;

C. *Opportunity* (Peluang)

Dari analisis *strength* dan *weakness*, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan *stakeholder* dan pemangku kepentingan;
2. Perencanaan yang disusun secara matang;
3. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif;
4. Memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi dan informasi.

D. *Treatment* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Kerbatasan pemahan dari masyarakat;
2. Tuntutan semakin beragam;
3. Aduan masyarakat;
4. Perubahan peraturan.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

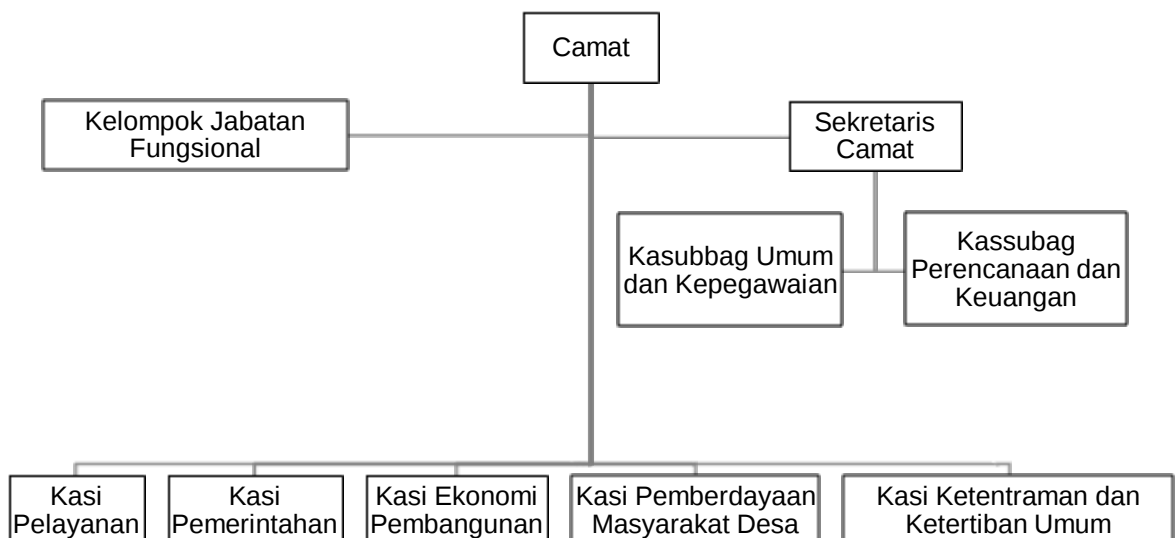
proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Beberapa permasalahan yang di hadapi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan *stakeholders* pada proses penyusunan perencanaan pembangunan;
2. Perencanaan tidak tepat waktu;
3. Pendanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Jatilawang tahun 2025-2026.

Struktur Organisasi Kecamatan



Adapun susunan organisasi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, terdiri dari:
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Seksi Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Desa;
6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantu.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c) koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

- 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d) koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan.
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e) koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f) koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;

- g) koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i) pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- j) penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Matriks Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduka	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Jatilawang														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

7	0	0	2.0	00	Koordinasi/Sinergi	PENDAPAT	Kab.		Rp. 525.000				Rp. 525.000	Rp. 1.000.000
	1	2	1	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	AN ASLI DAERAH (PAD)	Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa							
7	0	0	2.0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									
	1	2	3											
7	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	PENDAPAT	Kab.		Rp. 800.000				Rp. 800.000	Rp. 9.450.000
	1	2	3	02		AN ASLI DAERAH (PAD)	Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa							
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	1	2	4											
7	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	PENDAPAT	Kab.		Rp. 750.000				Rp. 750.000	Rp. 100.000
	1	2	4	02		AN ASLI DAERAH (PAD)	Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa							
7	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENDAPAT	Kab.		Rp. 750.000				Rp. 750.000	Rp. 100.000
	1	2	4	03		AN ASLI DAERAH (PAD)	Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa							

7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	0 1	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7	0 1	0 3	2.0 3	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 13.419.000				Rp. 13.419.000	Rp. 10.000.000
7	0 1	0 3	2.0 3	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 7.650.000				Rp. 7.650.000	Rp. 5.000.000
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									

7	0 1	0 4	2.0 1	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 57.900.000				Rp. 57.900.000	Rp. 100.000
7	0 1	0 4	2.0 1	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 100.000
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	0 1	0 5	2.0 1	00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 7.150.000				Rp. 7.150.000	Rp. 7.500.000

7	0 1	0 5	2.0 1	00 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 7.250.000
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	0 1	0 6	2.0 1	00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 8.400.000				Rp. 8.400.000	Rp. 1.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1	00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 1.000.000

7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kel/Desa		Rp. 1.800.000				Rp. 1.800.000	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	0	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 4.500.000				Rp. 4.500.000	Rp. 2.368.000
7	0	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 2.250.000				Rp. 2.250.000	Rp. 2.293.000
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

7	0 1	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 2.086.582.908				Rp. 2.086.582.908	Rp. 2.126.605.665
7	0 1	0 1	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 24.300.000				Rp. 24.300.000	Rp. 31.000.000
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	0 1	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 5.731.000				Rp. 5.731.000	Rp. 11.613.884
7	0 1	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 35.835.500				Rp. 35.835.500	Rp. 31.686.000
7	0 1	0 1	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 13.295.000				Rp. 13.295.000	Rp. 10.416.500
7	0 1	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 79.550.000				Rp. 79.550.000	Rp. 15.000.000

7	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 7.695.000				Rp. 7.695.000	Rp. 15.000.000
7	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 18.050.000				Rp. 18.050.000	Rp. 108.155.200
7	0	0	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 1.325.000				Rp. 1.325.000	Rp. 1.300.000
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	0	0	2.0	00	Pengadaan Mebel	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung			Rp. 3.500.000			Rp. 3.500.000	Rp. 20.000.000
7	0	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung			Rp. 60.788.500			Rp. 60.788.500	Rp. 30.000.000
7	0	0	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 10.410.000				Rp. 10.410.000	Rp. 15.000.000

7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	1	8										
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 49.744.092			Rp. 49.744.092	Rp. 60.693.751
	1	1	8	02									
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 12.000.000			Rp. 12.000.000	Rp. 8.000.000
	1	1	8	03									
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 352.428.000			Rp. 352.428.000	Rp. 375.000.000
	1	1	8	04									
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	1	9										
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 23.900.000			Rp. 23.900.000	Rp. 77.840.000
	1	1	9	01									

7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 14.410.000				Rp. 14.410.000	Rp. 25.000.000
7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Jatilawang, Tunjung		Rp. 12.125.000				Rp. 12.125.000	Rp. 13.000.000
Jumlah									Rp. 2.860.525.500	Rp. 64.288.500			Rp. 2.924.814.000	Rp. 3.022.572.000
									Kab. Banyumas, 2024 Camat Jatilawang  P. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M. NIP. 196910061992031006					

Sumber : SIPD RI

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Jatilawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun sumber lain;
2. Kecamatan Jatilawang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025;
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong terwujudnya cita-cita Kabupaten Banyumas menuju "Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari"

Jatilawang, 11 Juli 2024

KAMAT JATILAWANG



R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691006 19903 1 006